

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat sejak lama dipandang sebagai salah satu negara tujuan utama bagi migran di dunia. Identitasnya sebagai *nation of immigrants* tidak hanya merefleksikan sejarah mobilitas manusia yang panjang, tetapi juga keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi dan sosial negara tersebut. Sejak abad ke-19, tenaga kerja migran telah memainkan peran penting dalam pembangunan sektor pertanian, industri manufaktur, hingga ekonomi berbasis teknologi modern (Ngai, 2003). Migrasi tidak hanya menjadi fenomena demografis, tetapi juga menjadi bagian dari struktur ekonomi nasional yang mendukung pertumbuhan dan inovasi di Amerika Serikat.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, peran migran dalam perekonomian Amerika Serikat semakin terlihat signifikan. Pada tahun 2024, sekitar 48 juta penduduk Amerika Serikat merupakan imigran, atau sekitar 15 persen dari total populasi nasional (Migration Policy Institute, 2025). Dalam pasar tenaga kerja, migran juga memegang peranan penting dengan mencakup hampir 20 persen dari total tenaga kerja di Amerika Serikat (USAFacts, 2025). Kehadiran mereka tersebar di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor konstruksi, agrikultur, layanan kesehatan, hingga industri teknologi. Sebagai contoh, hampir 29,8 persen pekerja di sektor konstruksi merupakan tenaga kerja kelahiran luar negeri, sementara sektor

pertanian juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga kerja migran (U.S. Census Bureau, 2025). Selain mengisi kebutuhan tenaga kerja, migran juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2023, imigran di Amerika Serikat menyumbang sekitar USD 1,7 triliun dalam aktivitas ekonomi serta memberikan kontribusi pajak federal, negara bagian, dan lokal yang signifikan (Roy, 2025).

Namun demikian, meskipun migrasi memiliki kontribusi ekonomi yang besar, hubungan antara migrasi dan negara tidak pernah sepenuhnya bebas dari ketegangan. Dalam pendekatan *political economy of migration*, fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep *liberal paradox*, yaitu kondisi di mana negara-negara liberal membutuhkan migrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama menghadapi tekanan politik domestik untuk membatasi arus migrasi tersebut (Hollifield et al., 2008). Di satu sisi, sektor industri dan bisnis membutuhkan tenaga kerja migran untuk menjaga produktivitas dan daya saing ekonomi. Di sisi lain, migrasi sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas pasar tenaga kerja domestik, khususnya bagi pekerja dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah.

Paradoks tersebut menjadikan kebijakan imigrasi sebagai arena politik domestik yang kompleks. Berbagai aktor domestik memiliki kepentingan yang berbeda dalam isu migrasi. Perusahaan dan sektor industri sering kali mendukung penerimaan migran karena kebutuhan tenaga kerja, baik pada sektor pekerjaan

berupah rendah maupun pada sektor berteknologi tinggi. Sebaliknya, sebagian pekerja domestik dan kelompok politik tertentu melihat migrasi sebagai sumber kompetisi di pasar tenaga kerja yang dapat menekan upah dan kesempatan kerja. Dalam kerangka teori liberalisme menurut Moravcsik (2002), kebijakan negara pada akhirnya terbentuk melalui agregasi preferensi aktor domestik, di mana pemerintah berperan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan tersebut.

Perdebatan mengenai migrasi semakin menguat dalam dinamika politik Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan mengusung prinsip *America First*, Trump menempatkan kepentingan domestik Amerika Serikat sebagai prioritas utama dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam isu migrasi (American Immigration Council, 2025). Pada periode kepemimpinannya yang pertama, Trump menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperketat kontrol terhadap migrasi, seperti *travel ban* terhadap sejumlah negara mayoritas Muslim, pembangunan tembok perbatasan di wilayah selatan Amerika Serikat, serta kebijakan *zero tolerance* terhadap migrasi tidak berdokumen (Huang, 2025). Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan yang lebih restriktif terhadap migrasi, dengan penekanan pada kontrol perbatasan dan penegakan hukum imigrasi.

Pada periode kedua kepemimpinannya, orientasi kebijakan imigrasi Trump menunjukkan perkembangan yang lebih kompleks. Selain mempertahankan pendekatan restriktif terhadap migrasi ilegal dan permohonan suaka, kebijakan imigrasi juga mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat terhadap selektivitas ekonomi migran. Salah satu contoh yang menonjol adalah gagasan mengenai *Trump Gold Card*, yaitu skema imigrasi yang memberikan akses residensi kepada individu berkapital besar dengan kontribusi investasi tertentu kepada negara (Chia, 2025). Selain itu, kebijakan terkait visa kerja seperti H-1B juga mengalami perubahan melalui peningkatan biaya dan pengetatan kriteria, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran yang masuk benar-benar memiliki keterampilan dan kontribusi ekonomi yang tinggi.

Pembentukan orientasi ini menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengendalian mobilitas manusia, tetapi juga sebagai mekanisme seleksi ekonomi terhadap individu yang dapat memberikan manfaat finansial bagi negara. Dalam konteks ini, migrasi semakin diperlakukan sebagai variabel dalam strategi ekonomi nasional. Migran tidak lagi dipandang sebagai kategori yang homogen, melainkan sebagai kelompok yang dibedakan berdasarkan potensi kontribusi ekonomi yang dapat diberikan kepada negara.

Orientasi kebijakan imigrasi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana negara menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan tekanan politik domestik dalam pengelolaan migrasi. Di satu sisi, ekonomi Amerika Serikat

tetap bergantung pada keberadaan tenaga kerja migran untuk menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tekanan politik domestik mendorong negara untuk memperketat kontrol terhadap arus migrasi. Dalam konteks inilah kebijakan imigrasi pada periode Trump 2.0 menjadi menarik untuk dianalisis, terutama dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan dinamika ekonomi politik migrasi serta bagaimana negara mengagregasi berbagai kepentingan domestik dalam membentuk arah kebijakan imigrasi yang semakin selektif.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab “Bagaimana dinamika kepentingan ekonomi dan politik domestik dalam sistem migrasi Amerika Serikat mendorong munculnya kebijakan selektivitas migrasi pada periode Trump 2.0?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peran migrasi dalam struktur ekonomi Amerika Serikat, khususnya dalam kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja dan kontribusi ekonomi migran terhadap perekonomian nasional.
2. Menganalisis paradoks dalam sistem migrasi Amerika Serikat melalui konsep *liberal paradox*, yaitu kondisi ketika negara membutuhkan migrasi

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi pada saat yang sama menghadapi tekanan politik domestik untuk membatasi migrasi.

3. Mengidentifikasi aktor-aktor domestik dan kepentingan yang terlibat dalam isu migrasi di Amerika Serikat, serta bagaimana preferensi mereka mempengaruhi pembentukan kebijakan imigrasi negara.
4. Menganalisis kebijakan imigrasi pada periode Trump 2.0 sebagai bentuk selektivitas ekonomi migran, khususnya melalui kebijakan pembatasan migrasi non-ekonomi, monetisasi akses imigrasi, serta regulasi terhadap migrasi tenaga kerja.
5. Menjelaskan bagaimana kebijakan imigrasi Trump 2.0 merepresentasikan agregasi preferensi aktor domestik dalam konteks ekonomi politik migrasi, serta sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan rasionalitas utilitarian dalam seleksi migran berdasarkan kontribusi ekonomi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi *political economy of migration*. Penelitian ini berupaya memperkaya literatur mengenai kebijakan imigrasi dengan menunjukkan bagaimana kebijakan imigrasi tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan atau identitas nasional, tetapi juga oleh dinamika ekonomi politik

dan preferensi aktor domestik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan teori liberalisme dalam hubungan internasional, khususnya melalui pendekatan *domestic preference aggregation* yang dikemukakan oleh Moravcsik. Dengan menganalisis kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode Trump 2.0, penelitian ini memberikan perspektif mengenai bagaimana konflik kepentingan domestik dapat mempengaruhi orientasi kebijakan imigrasi negara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembentukan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, khususnya dalam konteks perubahan orientasi kebijakan pada periode kepemimpinan Donald Trump. Analisis mengenai hubungan antara kebutuhan ekonomi, tekanan politik domestik, dan selektivitas migrasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana negara merumuskan kebijakan imigrasi dalam menghadapi kepentingan yang saling bertentangan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, maupun masyarakat yang tertarik pada isu migrasi internasional, khususnya dalam memahami bagaimana kebijakan imigrasi dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi politik serta kepentingan domestik yang beragam.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Analisis terhadap kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump memerlukan pendekatan yang mampu menjelaskan migrasi sebagai bagian dari strategi ekonomi dan politik negara. Dalam konteks ini, migrasi tidak dipahami semata sebagai fenomena sosial atau kemanusiaan, melainkan sebagai objek kebijakan yang dapat dikelola, diseleksi, dan dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan nasional. Tinjauan pustaka berikut menguraikan kontribusi dan keterbatasan literatur yang menjadi fondasi konseptual dan analitis penelitian ini, sekaligus menunjukkan relevansi dan ruang kosong yang ingin diisi oleh studi ini.

Literatur pertama yang menjadi rujukan utama adalah *The Political Economy of Migration Processes* karya Stephen Collinson (2009). Collinson memandang migrasi sebagai bagian dari proses ekonomi-politik global yang secara aktif dikelola oleh negara. Dalam kerangka ini, negara tidak bertindak netral, melainkan menggunakan kebijakan imigrasi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi, dan meminimalkan beban fiskal. Migrasi diposisikan sebagai variabel kebijakan yang dapat diatur untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi nasional. Pendekatan ini relevan bagi penelitian ini karena menyediakan

landasan teoritis untuk memahami kebijakan imigrasi sebagai instrumen ekonomi negara. Namun, kajian Collinson masih bersifat makro dan struktural, sehingga belum membahas secara spesifik bentuk-bentuk kebijakan imigrasi yang melakukan mekanisme seleksi secara ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka *political economy of migration* untuk menjelaskan logika ekonomi di balik kebijakan imigrasi Trump 2.0, sekaligus mempersempit fokus pada praktik selektivitas ekonomi dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Pendekatan serupa juga dikembangkan dalam kajian Castles, de Haas, dan Miller (2014) melalui buku *The Age of Migration*. Mereka menegaskan bahwa migrasi internasional merupakan fenomena yang terstruktur oleh dinamika ekonomi global dan kepentingan negara. Negara menggunakan kebijakan imigrasi untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja dan mempertahankan daya saing ekonomi di tengah globalisasi. Migrasi, dalam pandangan ini, tidak dapat dipisahkan dari struktur politik dan ekonomi yang lebih luas. Meskipun demikian, pembahasan Castles et al. dalam tulisan ini masih bersifat general dan lintas konteks, tanpa fokus khusus pada kebijakan seleksi migran berbasis modal. Selain itu, analisis terhadap Amerika Serikat tidak diarahkan pada periode kepemimpinan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini melanjutkan kerangka umum yang ditawarkan oleh Castles et al. dengan mengaplikasikannya secara spesifik

pada kebijakan imigrasi Trump 2.0 yang menunjukkan pola selektivitas ekonomi.

Untuk memahami konteks ekonomi-politik yang lebih luas dari kebijakan Trump, karya Ho-fung Hung *Global Capitalism in the Age of Trump* (2018) menjadi literatur penting. Hung menjelaskan bahwa kebijakan Trump merupakan respons terhadap krisis kapitalisme global dan menurunnya posisi ekonomi Amerika Serikat dalam sistem internasional. Dalam kondisi tersebut, negara terdorong untuk mengadopsi kebijakan yang lebih selektif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi nasional. Migrasi tidak lagi dipandang sebagai simbol keterbukaan, melainkan sebagai instrumen yang harus memberikan keuntungan konkret bagi negara. Namun, kajian Hung tidak secara spesifik membahas desain kebijakan imigrasi berbasis kapital maupun mekanisme seleksi migran dalam konteks kebijakan federal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis Hung sebagai latar struktural untuk menjelaskan mengapa kebijakan selektivitas ekonomi muncul dalam konteks Trump 2.0, sekaligus mengisi kekosongan dengan fokus pada kebijakan imigrasi sebagai strategi ekonomi negara.

Selain pendekatan ekonomi-politik, perspektif liberalisme juga memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kebijakan imigrasi dirumuskan. Andrew Moravcsik, melalui penelitiannya yang

berjudul *Liberal International Relations Theory: A Scientific Assessment*. Moravcsik menekankan bahwa perilaku negara dalam politik internasional sangat dipengaruhi oleh preferensi domestik yang berasal dari kelompok sosial, kepentingan ekonomi, dan institusi politik di dalam negara. Dalam kerangka ini, kebijakan luar negeri tidak semata ditentukan oleh struktur sistem internasional, tetapi juga oleh tekanan aktor domestik yang membentuk preferensi negara. Namun, pembahasan Moravcsik lebih berfokus pada pengembangan paradigma liberal dalam studi hubungan internasional secara umum dan tidak secara khusus membahas isu migrasi atau kebijakan imigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan kerangka pemikiran Moravcsik mengenai peran preferensi domestik untuk memahami bagaimana wacana dan kebijakan imigrasi pada era Trump dipengaruhi oleh dinamika politik domestik di Amerika Serikat.

Konsep liberal paradox dalam migrasi juga menjadi literatur pendukung dalam penelitian ini, sebagaimana dibahas dalam artikel tulisan Hollifield (2008) mengenai *The Liberal Paradox: Immigrants, Markets and Rights in the United States*. Hollifield menjelaskan bahwa negara liberal menghadapi paradoks antara kebutuhan ekonomi terhadap tenaga kerja migran dan kewajiban politik untuk mengontrol batas negara serta merespons tekanan domestik terhadap isu imigrasi. Di satu sisi, pasar mendorong keterbukaan terhadap migran karena kebutuhan tenaga kerja dan manfaat ekonomi, namun di sisi lain negara tetap berupaya membatasi

migrasi demi menjaga stabilitas politik dan sosial. Meskipun demikian, pembahasan Hollifield lebih berfokus pada dinamika struktural antara pasar, negara, dan rezim hak asasi dalam sistem migrasi liberal, tanpa secara khusus menganalisis perubahan diskursus politik terhadap migran pada periode kepemimpinan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini melanjutkan kerangka paradoks liberal tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana wacana politik pada era Donald Trump membentuk kebijakan yang semakin selektif terhadap migran, khususnya dalam konteks imigran Amerika Tengah.

Kajian yang secara langsung membahas kebijakan imigrasi Trump pada periode kedua disajikan dalam artikel *From Restriction to Rebalancing: The Evolution and Prospects of Trump 2.0 Immigration Policy* oleh Huang (2025). Huang menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Trump 2.0 tidak hanya menekankan restriksi, tetapi juga restrukturisasi jalur legal imigrasi dengan orientasi yang lebih selektif. Studi ini memberikan gambaran empiris mengenai arah kebijakan imigrasi Trump 2.0, termasuk kecenderungan penyesuaian kebijakan terhadap kepentingan ekonomi. Namun, kajian ini bersifat deskriptif dan belum secara eksplisit menggunakan kerangka *political economy of migration* atau konstruktivisme untuk menjelaskan motif di balik kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan temuan Huang sebagai pijakan

empiris, sekaligus melengkapinya dengan analisis teoritis mengenai ekspansi orientasi selektivitas ekonomi dalam imigrasi.

Berdasarkan keseluruhan literatur yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai migrasi sebagai instrumen ekonomi negara telah berkembang secara signifikan. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang secara spesifik mengkaji terjadinya liberal paradox dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump yang menghasilkan kebijakan yang selektif secara ekonomi. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan melihat kebijakan imigrasi Amerika Serikat melalui pendekatan *political economy of migration* dan menjelaskan proses bagaimana kebijakan imigrasi Trump 2.0 terbentuk dari preferensi domestik hingga terbentuk menjadi strategi ekonomi negara melalui teori liberalisme.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

1.5.2.1. Political Economy of Migration

Pendekatan *political economy of migration* berkembang sebagai kritik terhadap perspektif migrasi yang terlalu menekankan faktor individu, seperti perbedaan upah antarnegara atau keputusan rasional individu untuk bermigrasi. Sejak akhir 1970-an dan 1980-an, para ilmuwan mulai melihat migrasi sebagai fenomena struktural

yang berkaitan erat dengan dinamika kapitalisme global, kebijakan negara, dan kepentingan ekonomi politik domestik. Perspektif ini berakar pada tradisi *world-systems theory* dan *dependency theory* yang melihat migrasi sebagai bagian dari ekspansi sistem ekonomi global. Dalam studi migrasi modern, pendekatan ini dikembangkan oleh Portes dan Walton (1981), Sassen (1988), serta disintesis dalam literatur migrasi oleh Massey et al. (1993), yang menekankan bahwa mobilitas manusia tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur ekonomi global dan kebijakan negara.

Dalam perspektif *political economy of migration*, negara tidak dipandang sebagai aktor pasif yang sekadar menerima arus migrasi, melainkan sebagai aktor strategis yang secara aktif mengatur mobilitas manusia lintas batas. Negara membuka atau menutup jalur migrasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik domestik, serta kebutuhan tenaga kerja nasional (Portes & Walton, 1981). Dengan demikian, kebijakan imigrasi merupakan hasil dari interaksi antara kebutuhan ekonomi negara, tekanan politik domestik, dan pertimbangan legitimasi politik. Migrasi dalam konteks ini menjadi arena kebijakan yang sangat politis, di mana negara berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan.

Dalam literatur migrasi, paradoks tersebut sering dijelaskan melalui konsep *liberal paradox*. Hollifield menjelaskan bahwa negara-negara liberal menghadapi dilema struktural dalam pengelolaan migrasi: di satu sisi, ekonomi nasional membutuhkan tenaga kerja migran untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tetapi di sisi lain, negara menghadapi tekanan politik domestik untuk membatasi arus migrasi demi melindungi pasar tenaga kerja dan stabilitas sosial (Hollifield, Martin, & Orrenius, 2008). Kondisi ini membuat kebijakan imigrasi sering kali berada pada posisi yang ambivalen, yaitu antara kebutuhan untuk membuka akses migrasi dan tuntutan politik untuk memperketat kontrol terhadap migrasi.

Dalam kerangka *political economy of migration*, kebijakan imigrasi dipahami sebagai instrumen ekonomi dan politik yang digunakan negara untuk mengelola sumber daya manusia lintas batas. Negara cenderung melakukan seleksi terhadap migran berdasarkan potensi kontribusi ekonomi yang dapat mereka berikan, seperti keterampilan, modal finansial, maupun kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Ruhs (2013) menunjukkan bahwa negara sering menghadapi trade-off antara membuka akses migrasi untuk kepentingan ekonomi dan membatasi hak migran demi menjaga kepentingan politik domestik. Dalam konteks ini, imigran

sering diposisikan sebagai faktor produksi yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat dipandang sebagai potensi beban fiskal apabila dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Lebih lanjut, dinamika kapitalisme global juga mendorong negara untuk semakin selektif dalam menerima migran. Hung (2018) menunjukkan bahwa dalam era globalisasi ekonomi, negara semakin terdorong untuk mengintegrasikan kebijakan imigrasi dengan strategi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini mendorong munculnya kebijakan yang memprioritaskan jenis migran tertentu, seperti migran berketerampilan tinggi dan migran berkapital besar, karena kelompok ini dipandang mampu memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Dalam penelitian ini, pendekatan *political economy of migration* digunakan untuk menjelaskan rasionalitas ekonomi di balik kebijakan imigrasi pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana kebijakan imigrasi tidak hanya bertujuan untuk mengontrol mobilitas manusia, tetapi juga untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh negara dari migrasi internasional. Kebijakan seperti *Trump Gold Card*, pengetatan regulasi visa kerja H-1B, serta

pembatasan terhadap jalur migrasi non-ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk selektivitas ekonomi dalam kebijakan imigrasi.

Dengan demikian, pembatasan terhadap jalur imigrasi non-ekonomi, termasuk pencari suaka dan kelompok migran rentan, tidak dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari strategi negara dalam menghadapi dilema *liberal paradox*. Negara berupaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi terhadap migrasi dengan tekanan politik domestik untuk membatasi arus migrasi. Dalam konteks ini, kebijakan imigrasi pada periode Trump 2.0 menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat untuk mengelola migrasi secara selektif berdasarkan kontribusi ekonomi migran.

1.5.2.2. Liberalisme

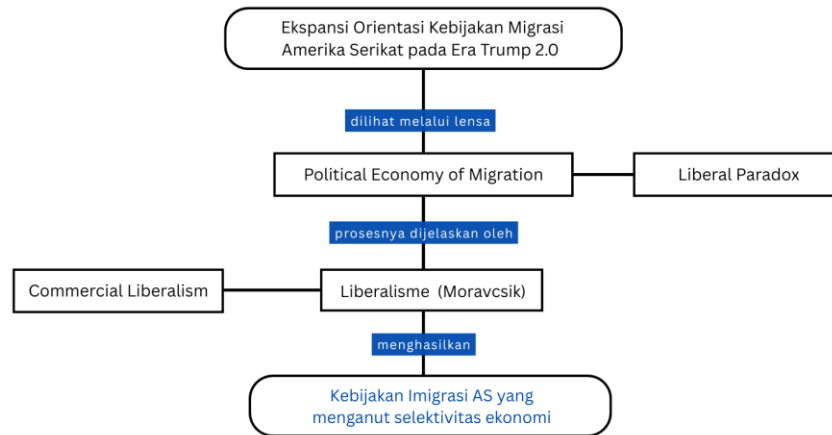
Dalam studi hubungan internasional, liberalisme memandang bahwa perilaku negara tidak hanya ditentukan oleh struktur sistem internasional, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di dalam masyarakat. Berbeda dengan perspektif realisme yang menempatkan negara sebagai aktor tunggal dengan kepentingan yang relatif homogen, liberalisme berangkat dari asumsi bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang beragam. Kelompok-

kelompok tersebut—seperti sektor bisnis, pekerja, maupun organisasi sosial—memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan publik dan berupaya mempengaruhi negara agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan mereka (Moravcsik, 1997). Dengan demikian, kebijakan negara dipahami sebagai hasil interaksi antara berbagai kepentingan domestik yang saling berkompetisi.

Moravcsik (1997) menjelaskan bahwa dalam perspektif liberalisme, negara berperan sebagai institusi yang mengagregasi preferensi yang muncul dari masyarakat domestik. Kebijakan negara terbentuk melalui proses *bottom-up*, dimana preferensi sosial terlebih dahulu muncul dari aktor domestik sebelum kemudian diterjemahkan oleh negara ke dalam kebijakan publik. Dalam kerangka ini, negara tidak sepenuhnya otonom dalam menentukan kebijakan, melainkan bertindak sebagai perantara yang mengagregasi berbagai kepentingan domestik yang saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memahami suatu kebijakan negara, penting untuk mengidentifikasi aktor domestik yang memiliki kepentingan terhadap isu tersebut serta bagaimana kepentingan tersebut mempengaruhi proses pembentukan kebijakan.

Lebih lanjut, Moravcsik membagi liberalisme ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu *ideational liberalism*, *commercial liberalism*, dan *republican liberalism*. Ketiga pendekatan ini menjelaskan sumber preferensi domestik yang berbeda dalam pembentukan kebijakan negara (Moravcsik, 1997). *Ideational liberalism* menekankan peran nilai dan identitas dalam membentuk preferensi politik, *republican liberalism* menyoroti pengaruh institusi politik dan mekanisme representasi, sedangkan *commercial liberalism* menempatkan kepentingan ekonomi sebagai faktor utama yang membentuk preferensi kebijakan negara.

Dengan demikian, dalam perspektif liberalisme, kebijakan imigrasi dapat dipahami sebagai hasil dari proses agregasi kepentingan domestik yang terjadi melalui mekanisme bottom-up. Aktor-aktor domestik seperti sektor bisnis, pekerja domestik, dan kelompok sosial lainnya memiliki kepentingan yang berbeda terhadap migrasi, sehingga menciptakan dinamika politik dalam proses pembentukan kebijakan. Negara kemudian berperan dalam mengagregasi kepentingan-kepentingan tersebut menjadi kebijakan imigrasi yang mencerminkan distribusi kekuasaan dan kepentingan dalam masyarakat domestik.



Gambar 1.1. Visualisasi flowchart kerangka berpikir

Penelitian ini berangkat dari ekspansi orientasi kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang semakin dikaitkan dengan pertimbangan kontribusi ekonomi migran terhadap negara. Dalam diskursus kebijakan publik, migran tidak lagi hanya dipahami sebagai individu yang melakukan mobilitas lintas negara, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang dinilai berdasarkan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, pasar tenaga kerja, dan penerimaan fiskal negara (Castles et al., 2014). Pada periode kedua kepemimpinannya, Donald Trump menekankan pendekatan selektivitas migrasi yang memprioritaskan individu dengan kapasitas finansial dan keterampilan tinggi, sekaligus memperketat jalur migrasi lain

yang dipersepsikan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi negara.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Political Economy of Migration* yang memandang migrasi sebagai bagian dari strategi ekonomi negara. Dalam perspektif ini, negara bertindak sebagai aktor yang secara selektif mengatur akses migrasi berdasarkan kalkulasi manfaat ekonomi dan kepentingan nasional. Kebijakan migrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perbatasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengelola sumber daya manusia lintas negara demi mendukung daya saing ekonomi.

Namun demikian, arah kebijakan imigrasi negara juga dipengaruhi oleh dinamika kepentingan domestik. Mengacu pada perspektif liberalisme, kebijakan negara merupakan hasil agregasi preferensi aktor-aktor domestik seperti kelompok industri, pekerja domestik, dan aktor politik. Perbedaan kepentingan antara tuntutan keterbukaan ekonomi dan kebutuhan perlindungan pasar tenaga kerja domestik kemudian melahirkan liberal paradox, yaitu kondisi di mana negara secara bersamaan membuka dan membatasi migrasi melalui mekanisme selektivitas.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana selektivitas migrasi pada awal era trump 2.0 tercermin melalui tiga indikator utama, yaitu restriksi terhadap jalur migrasi non-ekonomi,

monetisasi kebijakan imigrasi melalui skema berbasis modal, serta pengetatan terhadap visa tenaga kerja seperti program H-1B. Ketiga indikator ini menunjukkan bagaimana kebijakan imigrasi pada periode tersebut semakin dipengaruhi oleh logika utilitarian yang menilai migran berdasarkan kontribusi ekonomi yang dapat mereka berikan bagi negara.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Utilitarianisme

Konsep utilitarianisme sendiri berangkat dari kata *utility* yang merujuk pada manfaat, kegunaan, atau keuntungan yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan. Dalam kerangka utilitarianisme, penilaian terhadap benar atau salahnya suatu tindakan tidak ditentukan oleh niat, aturan moral absolut, ataupun prinsip hak individu, melainkan oleh konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, suatu tindakan dinilai bermoral apabila konsekuensinya menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan alternatif tindakan lain (Bentham, 1789).

Jeremy Bentham sebagai tokoh utama utilitarianisme klasik merumuskan prinsip dasar utilitarianisme melalui apa yang ia sebut sebagai *principle of utility*, yakni prinsip yang menyetujui atau

menolak suatu tindakan berdasarkan kecenderungannya dalam meningkatkan atau menurunkan kebahagiaan pihak-pihak yang terdampak. Bentham mendefinisikan utilitas sebagai segala sesuatu yang menghasilkan manfaat, kesenangan, atau kebahagiaan, serta mencegah rasa sakit atau kerugian (Bentham, 1789). Dengan demikian, utilitarianisme menempatkan konsekuensi sebagai pusat penilaian moral.

1.6.1.2. Preferensi Aktor Domestik

Dalam perspektif liberalisme, kebijakan negara tidak terbentuk secara otonom dari struktur internasional, melainkan merupakan hasil dari agregasi preferensi yang berasal dari masyarakat domestik. Moravcsik (2002) menjelaskan bahwa negara bertindak sebagai *transmission belt* yang menyalurkan dan mengagregasi kepentingan berbagai aktor domestik seperti kelompok ekonomi, pemilih, dan institusi politik. Preferensi yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut terbentuk dari kepentingan material maupun ideational yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, distribusi keuntungan, serta posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi domestik. Dengan demikian, kebijakan publik—termasuk kebijakan imigrasi—merupakan refleksi dari dinamika

interaksi antara berbagai kepentingan domestik yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan negara (Moravcsik, 2002).

Dalam konteks migrasi, preferensi aktor domestik seringkali muncul dari kepentingan ekonomi yang berbeda di dalam masyarakat. Kelompok industri dan perusahaan cenderung mendukung keterbukaan migrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi, sementara kelompok pekerja domestik atau organisasi buruh seringkali mendorong pembatasan migrasi untuk melindungi kesempatan kerja dan tingkat upah di pasar tenaga kerja domestik. Perbedaan kepentingan ini menciptakan dinamika politik yang mendorong negara untuk merumuskan kebijakan imigrasi yang merefleksikan kompromi antara tuntutan keterbukaan ekonomi dan tekanan proteksionisme domestik (Moravcsik, 2002; Freeman, 1995).

1.6.1.3. Paradoks dalam Kebijakan Imigrasi

Konsep ini merujuk pada **liberal paradox** yaitu dilema yang dihadapi negara-negara liberal dalam mengelola migrasi internasional. Hollifield menjelaskan bahwa negara modern harus menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali bertentangan, yaitu kebutuhan ekonomi untuk membuka akses migrasi dan tekanan politik domestik untuk membatasi migrasi (Hollifield,

2004). Dalam sistem ekonomi global yang semakin terintegrasi, migrasi tenaga kerja menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Namun di sisi lain, negara juga menghadapi tekanan politik dari masyarakat domestik yang menuntut perlindungan terhadap lapangan kerja, stabilitas sosial, serta keamanan nasional.

Paradoks ini muncul karena negara liberal pada saat yang sama terikat oleh logika pasar yang mendorong keterbukaan mobilitas tenaga kerja dan oleh tuntutan politik domestik yang cenderung mengarah pada pembatasan migrasi. Akibatnya, kebijakan imigrasi sering kali berada dalam posisi ambivalen: negara tetap membuka jalur migrasi tertentu untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menerapkan berbagai bentuk pembatasan untuk merespons tekanan politik domestik (Hollifield, 2004). Dengan demikian, liberal paradox menjelaskan bagaimana negara mengelola ketegangan antara keterbukaan ekonomi dan kontrol politik dalam sistem migrasi.

1.6.1.4. Imigran

Secara konseptual, imigran merujuk pada individu yang berpindah dari negara asalnya ke negara lain dengan tujuan menetap, baik secara sementara maupun permanen, serta berada di bawah

rezim hukum dan kebijakan negara tujuan. Dalam kajian Hubungan Internasional dan migrasi, imigran dipahami sebagai kategori hukum dan politik yang dibentuk oleh kebijakan negara, bukan sekadar sebagai fenomena demografis atau sosial (Castles & Miller, 2009).

Organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) mendefinisikan imigran sebagai seseorang yang berpindah lintas batas internasional dan tinggal di negara tujuan dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari motif perpindahan maupun status hukum yang dimilikinya (IOM, 2019). Definisi ini menekankan bahwa kategori imigran mencakup berbagai bentuk mobilitas, termasuk migrasi ekonomi, migrasi keluarga, dan bentuk migrasi lainnya yang diatur oleh kebijakan negara.

Dalam literatur akademik, imigran juga dipahami sebagai subjek kebijakan yang perlakuannya tidak seragam, melainkan dibedakan berdasarkan kategori hukum, tujuan migrasi, dan nilai yang dilekatkan oleh negara tujuan. Bosniak (2006) menekankan bahwa status imigran merefleksikan posisi yang ambigu dalam keanggotaan politik negara, di mana individu berada di dalam wilayah negara namun tidak sepenuhnya memiliki hak dan perlindungan yang setara dengan warga negara. Dengan demikian,

imigran merupakan kategori yang secara inheren politis dan diproduksi melalui praktik kebijakan negara.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Utilitarianisme

Dalam penelitian ini, utilitarianisme dioperasionalkan sebagai logika kebijakan publik yang menilai dan merancang kebijakan berdasarkan konsekuensi dan manfaat agregat yang dihasilkan bagi negara. Utilitarianisme tidak dipahami sebagai penilaian normatif atas benar atau salahnya suatu kebijakan, melainkan sebagai landasan analitis untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan dirancang dengan tujuan memaksimalkan manfaat kolektif, khususnya dalam aspek ekonomi dan kepentingan nasional (Sen, 1979; Dimmock & Fisher, 2017).

Secara operasional, utilitarianisme dalam penelitian ini diidentifikasi melalui kebijakan imigrasi yang menunjukkan kecenderungan konsekuensial, maksimalisasi manfaat, dan memprioritaskan hasil ekonomi dibandingkan pertimbangan hak individu atau perlindungan kelompok tertentu. Dalam kebijakan imigrasi, logika utilitarian tercermin ketika imigran diperlakukan sebagai variabel dalam perhitungan manfaat ekonomi negara, seperti

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara (Ruhs, 2013).

1.6.2.2. Preferensi Aktor Domestik

Dalam penelitian ini, konsep preferensi aktor domestik digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi pembentukan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada awal era trump 2.0. Preferensi tersebut dioperasionalkan melalui analisis terhadap aktor-aktor domestik yang memiliki kepentingan langsung terhadap sistem migrasi, khususnya kelompok commercial actor, ideational actor, dan political actor. Masing-masing aktor memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan imigrasi, terutama terkait kebutuhan tenaga kerja, perlindungan pasar kerja domestik, serta stabilitas ekonomi nasional.

Secara operasional, preferensi aktor domestik dalam penelitian ini diidentifikasi melalui tiga indikator utama, yaitu kebutuhan tenaga kerja oleh sektor industri terhadap pekerja migran, tuntutan perlindungan terhadap pekerja domestik dari kompetisi tenaga kerja asing, serta posisi organisasi pekerja dalam menanggapi kebijakan pengetatan imigrasi. Ketiga indikator tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana kepentingan yang saling berseberangan ini

kemudian diagregasi oleh negara dan diterjemahkan menjadi kebijakan imigrasi yang bersifat selektif, seperti restriksi terhadap jalur migrasi tertentu, monetisasi kebijakan imigrasi, serta pengetatan terhadap visa tenaga kerja seperti program H-1B, dan juga penegakan imigrasi oleh ICE.

1.6.2.3. Paradoks dalam Kebijakan Imigrasi

Dalam penelitian ini, konsep paradoks digunakan untuk menjelaskan dinamika kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada awal era trump 2.0 yang menunjukkan kecenderungan selektivitas migrasi berbasis nilai ekonomi. Paradoks tersebut dioperasionalkan melalui identifikasi dua kecenderungan kebijakan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu pembatasan terhadap jalur migrasi tertentu dan keterbukaan selektif terhadap migrasi yang dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Dengan kata lain, negara tidak sepenuhnya menutup migrasi, tetapi menerapkan mekanisme seleksi yang menilai migran berdasarkan kontribusi ekonomi yang dapat mereka berikan.

Secara operasional, paradoks dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada awal era trump 2.0 dianalisis melalui tempat indikator utama. Pertama, restriksi terhadap jalur migrasi non-ekonomi seperti pembatasan terhadap asylum seekers dan kebijakan

travel ban. Kedua, monetisasi kebijakan imigrasi melalui skema berbasis investasi seperti Trump Gold Card yang memberikan akses migrasi bagi individu dengan kapasitas finansial tinggi. Ketiga, pengetatan terhadap visa tenaga kerja seperti program H-1B yang bertujuan untuk menyaring pekerja migran berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja domestik. Keempat indikator tersebut menunjukkan bagaimana negara berupaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi terhadap migrasi dengan tekanan politik domestik untuk membatasi akses migrasi.

1.6.2.4. Imigran

Secara operasional, imigran dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori analitis utama. Pertama, imigran ekonomi, yaitu individu yang masuk atau diprioritaskan dalam sistem imigrasi berdasarkan kontribusi ekonomi langsung, seperti kepemilikan modal finansial, kemampuan investasi, atau keterampilan yang dianggap strategis bagi perekonomian nasional. Kategori ini sejalan dengan literatur *political economy of migration* yang menunjukkan bahwa negara tujuan migrasi cenderung memberikan preferensi kebijakan kepada migran yang dipersepsikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional (Hollifield et al., 2014).

Kedua, imigran non-ekonomi, yaitu individu yang tidak secara langsung diklasifikasikan berdasarkan nilai ekonomi dalam kebijakan imigrasi, termasuk pencari suaka dan kelompok imigran lain yang masuk melalui jalur perlindungan atau non-pasar. Dalam kerangka kebijakan, kelompok ini sering kali diposisikan sebagai kategori yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi langsung dan karenanya menghadapi hambatan administratif yang lebih besar atau prioritas kebijakan yang lebih rendah (Bosniak, 2006). Klasifikasi ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian normatif, melainkan sebagai refleksi dari cara negara mengelola dan membedakan imigran dalam kebijakan imigrasi.

Dalam penelitian ini, identifikasi kategori imigran dilakukan melalui kriteria kebijakan, bukan karakteristik individual semata. Kriteria tersebut meliputi jalur masuk keimigrasian, persyaratan yang dikenakan oleh kebijakan federal, serta narasi resmi pemerintah mengenai nilai dan fungsi imigran bagi kepentingan nasional. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana kebijakan imigrasi pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump memperlakukan imigran secara diferensial berdasarkan orientasi ekonomi, tanpa memasuki ranah evaluasi normatif atas dampak sosial atau kemanusiaan kebijakan tersebut.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump menunjukkan kecenderungan selektivitas migrasi yang tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan ekonomi objektif, melainkan dibentuk oleh konstruksi persepsi domestik terhadap migrasi. Dalam kerangka *political economy of migration*, negara tidak hanya mengatur mobilitas manusia, tetapi juga menggunakan kebijakan migrasi sebagai instrumen untuk merespons dinamika kepentingan domestik, baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Pada awal era trump 2.0, orientasi ini tercermin melalui kebijakan yang secara simultan membatasi jalur migrasi tertentu, sekaligus memprioritaskan kelompok migran yang dianggap memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Lebih lanjut, penelitian ini berargumen bahwa selektivitas tersebut merupakan hasil dari agregasi preferensi aktor domestik sebagaimana dijelaskan dalam perspektif liberalisme. Namun, preferensi tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi riil, melainkan dipengaruhi oleh narasi yang membingkai migrasi sebagai ancaman terhadap tenaga kerja domestik. Interaksi antara kebutuhan ekonomi dan tekanan politik ini kemudian menghasilkan kondisi *liberal paradox*, di mana negara dihadapkan pada dilema antara mempertahankan keterbukaan ekonomi dan merespons tuntutan pembatasan migrasi. Dalam konteks ini, kebijakan selektivitas imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

ekonomi, tetapi juga sebagai respons politik yang dalam beberapa kasus menghasilkan konsekuensi yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis logika kebijakan, konstruksi makna, serta orientasi kebijakan negara dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kebijakan sebagai produk sosial dan politik yang sarat dengan makna, narasi, dan kepentingan, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Creswell, 2014).

1.8.1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Tipe deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik dan arah kebijakan imigrasi yang diberlakukan pada periode penelitian, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan kebijakan tersebut melalui kerangka teoritis yang telah ditetapkan, yaitu *political economy of migration*, dan liberalisme. Dengan tipe deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya memaparkan kebijakan yang ada, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan logika utilitarian dan praktik kapitalisasi kebijakan imigrasi.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini bersifat dokumentatif dan virtual, karena data dikumpulkan dengan metode *desk research* melalui studi pustaka secara daring. Peneliti berfokus pada sumber primer seperti dokumen resmi dan laporan organisasi internasional. Fokus geografis berada pada kebijakan imigrasi Amerika Serikat di masa pemerintahan Trump yang kedua, terkhusus tahun 2025-2026.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dirumuskan dan diberlakukan pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump dalam rentang tahun 2025 hingga 2026. Penelitian ini tidak menjadikan individu imigran sebagai subjek penelitian, melainkan memfokuskan analisis pada produk kebijakan, regulasi, dan narasi kebijakan resmi yang mencerminkan orientasi dan logika kebijakan negara. Dengan demikian, subjek penelitian dipahami sebagai entitas kebijakan, bukan aktor individu

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut berupa teks kebijakan, dokumen resmi, pernyataan publik, dan laporan kebijakan yang relevan dengan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode penelitian. Data kualitatif dipilih karena memungkinkan

analisis mendalam terhadap makna, narasi, dan justifikasi kebijakan yang tidak dapat direduksi menjadi angka semata

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori.

Pertama, sumber data primer, yang meliputi dokumen kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat, seperti *executive orders*, regulasi imigrasi federal, pernyataan resmi pejabat pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan langsung dengan imigrasi.

Kedua, sumber data sekunder, yang mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan publikasi kebijakan yang relevan dengan studi migrasi, utilitarianisme kebijakan publik, dan *political economy of migration*

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (*document-based research*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada periode penelitian. Studi dokumentasi dipilih karena kebijakan imigrasi sebagai objek penelitian terutama direpresentasikan melalui teks resmi dan narasi kebijakan negara

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif interpretatif dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*) terhadap berbagai dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, serta sumber literatur yang berkaitan dengan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump 2.0. Melalui metode ini, data dianalisis dengan mengidentifikasi kelompok aktor-aktor domestik yang memiliki preferensi dalam kebijakan imigrasi. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut, kemudian mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *political economy of migration* dan perspektif liberalisme yang menekankan peran preferensi aktor domestik dalam pembentukan kebijakan negara.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk memastikan kualitas data, penelitian ini menerapkan prinsip kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui penggunaan sumber data resmi dan literatur akademik yang kredibel. Dependabilitas dicapai dengan konsistensi prosedur pengumpulan dan analisis data. Konfirmabilitas dijaga dengan mendasarkan seluruh analisis pada data dan literatur yang dapat diverifikasi, sehingga meminimalkan subjektivitas peneliti dalam menarik kesimpulan. Seluruh sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi atas keabsahan informasi yang digunakan.